



Sumber Berita: **KALTARA POS**

TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
				✓							

TAHUN: **2015**

HALAMAN: **3**

# BPK-RI TETAPKAN LAPORAN KEUANGAN KALTARA WTP

## MARTIN SABLON : BERHARAP KEDEPANNYA LEBIH BAIK LAGI

**TAMUNG SELOR** – Suatu hal yang mengejutkan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Hal itu di katakan Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Kaltara, Ade Iwan Rusmana saat menyampaikan sambutannya Pembukaan Rapat Paripurna Istimewa ke-4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kaltara dalam rangka penyerahan hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Kaltara tahun anggaran 2014 yang dilakukan oleh pihaknya kepada ketua DPRD dan Gubernur Kaltara.

Terkait hal itu, Ketua DPRD Kaltara, Martin Sablon mengapresiasi BPK-RI yang mana telah melakukan pemeriksaan itu sehingga pihaknya selaku DPRD dapat melakukan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Mendapatkan opini WTP bagu se-

buah Daerah Otonomi Baru (DOB) itu merupakan suatu hal yang patut dibanggakan. Dan semoga kedepannya dapat lebih baik lagi agar dapat menghantarkan masyarakatnya menjadi masyarakat yang sejahtera,” kata Martin saat ditemu, kemarin (29/5).

Dikatakan olehnya hasil dari upaya yang telah dilakukan selama ini Alhamdulillah menghasilkan sesuatu yang positif sekali. Dalam artian, hasil dari pemeriksaan yang dilakukan itu sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Sebab, kata dia, dari hasil yang dilakukan dalam waktu 1,6 tahun bisa mendapatkan hasil WTP merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. “Tentunya kami sangat puaslah dengan hasil yang sudah didapatkan dengan predikat WTP ini,” sebutnya.

Terkait masalah kelenahan yang masih ada saat ini, kata dia, tentunya diharapkan kepada Pemprov Kaltara dapat terus bekerja keras untuk mempertahankan predikat itu. Dan pihaknya

juga sudah mengingatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Setprov Kaltara agar dapat lebih teliti lagi dalam menyusun data laporan keuangan daerah.

Ditempat yang berbeda, H Iwan mengatakan, yang dinilai oleh pihaknya saat ini merupakan laporan keuangan daerah secara keseluruhan yang merupakan gabungan laporan keuangan dari SKPD yang ada.

Dengan begitu pihaknya mengimbau kepada Pemprov Kaltara, terutama kepada kepala daerahnya, harus bisa melakukan pemantauan terhadap laporan keuangan pemerintahan daerah. Sebab, semua gerak yang ada di bawahnya itu tergantung dari atasannya.

Bukan hanya kepala daerah saja, pihaknya juga mengimbau kepada pihak inspektorat agar dapat benar-benar berperan didalamnya. “Inspektorat tidak hanya sebagai tameng kepala daerah daerah dan lain sebagainya. Sehingga dapat bersinergi,” kata dia. (\*/fwk)